

Evaluasi Dampak Bantuan Sosial Daerah terhadap Pengeluaran dan Konsumsi per Kapita Provinsi Kalimantan Timur

Rangga Aji Wijaksono^{1*}

¹Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Samarinda

*Alamat Korespondensi: rangga.wijaksono@kemenkeu.go.id

Abstract

Social assistance is a fiscal policy instrument to reduce inequality and improve household welfare. East Kalimantan has a high GRDP but faces income inequality, reflected in its Gini Ratio, the highest in Kalimantan since 2022. Unlike previous studies that mainly evaluated national social assistance or specific programs such as PKH, BPNT, BST, and Raskin, evidence on local government social assistance in East Kalimantan remains limited. This study addresses this gap using 2023 Susenas data and Propensity Score Matching (PSM) to reduce selection bias between beneficiary and non-beneficiary households. The unit of analysis is the household, with local social assistance receipt as the treatment and per capita food expenditure, non-food expenditure, calorie intake, protein intake, and carbohydrate intake as outcomes. Propensity scores are estimated using a logit model based on household characteristics, followed by Nearest Neighbor Matching, covariate balance testing, and Average Treatment Effect on the Treated (ATT) estimation. The results show that local social assistance reduces expenditure burdens by 10.53% for food and 11.69% for non-food, but does not significantly improve consumption quality. The findings imply that provincial and district/city governments in East Kalimantan should improve beneficiary targeting, direct assistance toward nutritious food, and conduct periodic evaluations using integrated data.

Keywords: Social Assistance; Household Welfare; Income Inequality; Propensity Score Matching (PSM); East Borneo.

Abstrak

Pemberian bantuan sosial (bansos) merupakan instrumen kebijakan fiskal daerah untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Kalimantan Timur memiliki PDRB tinggi, tetapi masih menghadapi ketimpangan pendapatan yang menonjol, tercermin dari Gini Ratio yang konsisten tertinggi di Kalimantan sejak 2022. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang banyak mengevaluasi bansos nasional atau program spesifik seperti PKH, BPNT, BST, dan Raskin, kajian empiris mengenai dampak bansos pemerintah daerah di Kalimantan Timur masih terbatas. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menggunakan data Susenas 2023 dengan metode *Propensity Score Matching* (PSM) untuk mengurangi bias seleksi antara rumah tangga penerima dan non-penerima bansos. Unit analisis penelitian adalah rumah tangga Kalimantan Timur, dengan status penerimaan bansos daerah sebagai *treatment* dan pengeluaran makanan, pengeluaran non-makanan, konsumsi kalori, protein, serta karbohidrat per kapita sebagai *outcome*. *Propensity score* diestimasi melalui model logit berdasarkan karakteristik rumah tangga, kemudian dilakukan *Nearest Neighbor Matching*, uji keseimbangan kovariat, dan estimasi *Average Treatment Effect on the Treated* (ATT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bansos daerah menurunkan beban pengeluaran sebesar 10,53% untuk makanan dan 11,69% untuk non-makanan, tetapi belum signifikan meningkatkan kualitas konsumsi. Implikasinya, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur perlu menajamkan sasaran penerima, mengarahkan bantuan pada pangan bergizi, serta melakukan evaluasi berkala berbasis data terpadu.

Kata Kunci: Bantuan Sosial; Kesejahteraan Rumah Tangga; Ketimpangan Pendapatan; *Propensity Score Matching* (PSM); Kalimantan Timur.



Jurnal Manajemen
Perbendaharaan
<https://jmp.kemenkeu.go.id/>

60

JEL Classification: I38

How to Cite: Wicaksono, R. A. (2026). Evaluasi dampak bantuan sosial daerah terhadap pengeluaran dan konsumsi per kapita Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 7(1), 60-72.

Jurnal Manajemen Perbendaharaan
Vol. 7 No. 1, 2026
pp. 60-72

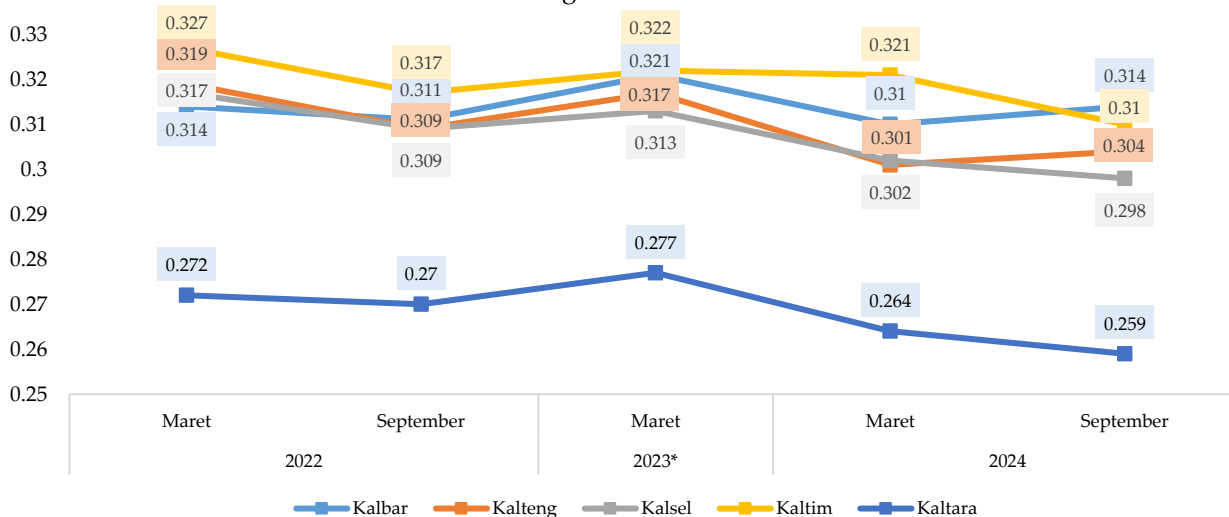
e-ISSN: 2775-5010
p-ISSN: 2776-7256
DOI: [10.33105/jmp.v7i1.581](https://doi.org/10.33105/jmp.v7i1.581)

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan ekonomi yang dapat diukur melalui pengeluaran dan konsumsi per kapita masyarakat. Berdasarkan teori kesejahteraan (*welfare economics*), optimalisasi alokasi sumber daya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Di Indonesia, pemberian bantuan sosial (*bansos*) menjadi salah satu cara dalam mendukung distribusi pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Hal ini sesuai dengan teori distribusi pendapatan yang bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi dan meningkatkan konsumsi masyarakat miskin dan sejalan pula dengan Model Keynesian yang menyatakan peningkatan konsumsi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejumlah program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa telah diterapkan secara luas untuk menjaga daya beli kelompok rentan dan memastikan akses terhadap kebutuhan dasar. Dalam konteks kebijakan sosial di Indonesia, efektivitas *bansos* menjadi isu krusial mengingat besarnya alokasi anggaran setiap tahunnya.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Sebagai provinsi dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi akibat kontribusi sektor pertambangan dan migas yang sangat melimpah, ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat tetap menjadi salah satu isu yang signifikan. Apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur cenderung memiliki angka ketimpangan yang lebih tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sejak tahun 2022 hingga semester I tahun 2024, gini ratio Provinsi Kalimantan Timur selalu menempati posisi tertinggi di Pulau Kalimantan (Gambar 1).

Gambar 1 Gini Ratio Regional Kalimantan Tahun 2022-2024

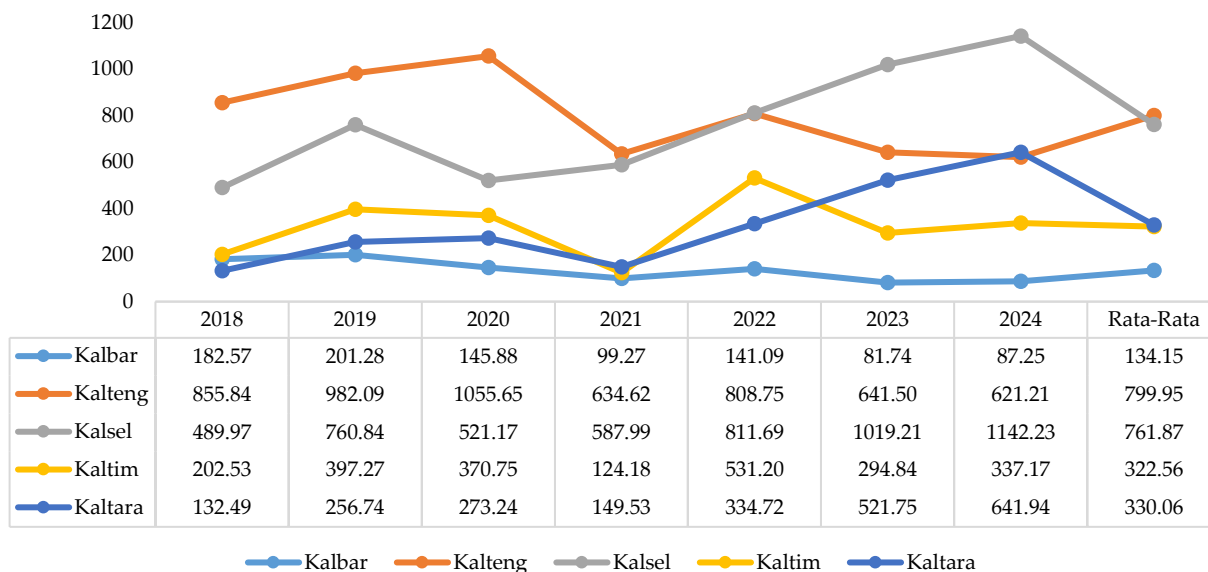


Sumber: BPS, diolah.

Berdasarkan data rasio belanja Pemda untuk *bansos* terhadap jumlah penduduk miskin sebagaimana Gambar 2, secara rata-rata, Provinsi Kalimantan Timur menempati posisi kedua terbawah setelah Kalimantan Barat. Sementara itu, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan memiliki nilai rasio tertinggi terkait belanja *bansos* APBD terhadap penduduk miskin. Hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa belanja *bansos* berpengaruh dalam mengurangi angka ketimpangan di suatu wilayah.

Dalam konteks kebijakan fiskal, efektivitas *bansos* daerah juga perlu dipahami sebagai bagian dari kualitas belanja pemerintah. Najmi et al. (2024) menunjukkan bahwa belanja pemerintah memiliki hubungan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, sementara pertumbuhan ekonomi berkorelasi negatif dengan kemiskinan. Temuan tersebut memperkuat pentingnya memastikan belanja *bansos* APBD tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga benar-benar diarahkan pada kelompok rentan dan kebutuhan yang berdampak pada kesejahteraan rumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan upaya evaluasi yang komprehensif untuk memastikan bahwa program *bansos* benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi ini penting untuk mengukur sejauh mana efektivitas program *bansos* dalam mendorong peningkatan pengeluaran dan konsumsi per kapita rumah tangga. Secara khusus, analisis tersebut difokuskan pada Provinsi Kalimantan Timur sebagai wilayah studi guna memperoleh bukti empiris yang relevan.

Gambar 2 Rasio Belanja Bansos APBD terhadap Penduduk Miskin Regional Kalimantan (Ribu Rupiah)

Sumber: DJPK & BPS, diolah

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengevaluasi dampak bansos terhadap kesejahteraan rumah tangga. Studi yang dilakukan oleh Khasanah & Purwanti (2023) menemukan bahwa setelah diterimanya Program Keluarga Harapan (PKH), program tersebut secara signifikan mendorong peningkatan pengeluaran pendidikan sebesar Rp215.060 per bulan serta meningkatkan pengeluaran konsumsi sebesar Rp734.720 per bulan, dengan asumsi faktor lain tetap konstan. Sementara itu, penelitian Sahara et al. (2024) yang mengkaji dampak bansos sebagai intervensi gizi terhadap status stunting balita menunjukkan bahwa program bansos memberikan dampak pada peningkatan probabilitas balita stunting sebesar 4,8%. Selain itu, Supandi (2021) juga mengkaji dampak raskin yang dapat menurunkan beban pengeluaran para penerimanya di Kabupaten Ketapang. Namun, penelitian spesifik terkait dampak bansos di Kalimantan Timur masih terbatas, sehingga diperlukan studi berbasis data yang lebih mendalam.

Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah mengevaluasi dampak bansos di Indonesia, khususnya terkait pengeluaran dan konsumsi rumah tangga, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji dampak bansos menggunakan metode *Propensity Score Matching* (PSM) untuk Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan data Susenas tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut serta memberikan masukan dalam mengevaluasi dampak kebijakan sosial ini. Dengan menggunakan data yang lebih terkini dan metode PSM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang tepat mengenai pengaruh program bansos daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur, sekaligus memberikan kontribusi baru dalam literatur evaluasi dampak kebijakan sosial di Indonesia."

Pendekatan metodologis dalam mengevaluasi dampak bansos masih menjadi tantangan. Beberapa studi sebelumnya banyak menggunakan metode regresi OLS atau *Difference-in-Differences* (DiD) yang berisiko mengalami bias seleksi (Ravallion et al., 2005). Penerima bansos umumnya dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti tingkat kemiskinan, kondisi tempat tinggal, atau kepemilikan kartu sosial, sehingga kelompok penerima dan non-penerima cenderung memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, metode *Propensity Score Matching* (PSM) menjadi alternatif yang lebih tepat dalam mengevaluasi dampak bansos. Dengan metode ini, kelompok penerima dan non-penerima dapat dicocokkan berdasarkan karakteristik serupa, sehingga hasil estimasi dampaknya lebih akurat dan meminimalisasi bias seleksi pada data (Rosenbaum & Rubin, 1983).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak program bansos terhadap pengeluaran dan konsumsi per kapita rumah tangga di Kalimantan Timur menggunakan metode PSM. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang berguna bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam merumuskan kebijakan bansos yang lebih efektif, serta dalam mengoptimalkan alokasi anggaran untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN LITERATUR

Secara teoretis, hubungan antara bansos dan konsumsi rumah tangga dapat dijelaskan melalui Teori Konsumsi Keynesian. Menurut Keynes (1936), Konsumsi rumah tangga besar dipengaruhi oleh pendapatan disposabel, yakni pendapat setelah dikurangi pajak. Pada teori ini dijelaskan konsep *Marginal Propensity to Consume* (MPC) dan *Marginal Propensity to Consume* (MPS), yaitu proporsi tambahan pendapatan yang digunakan untuk dikonsumsi atau ditabung, dimana,

$$MPC + MPS = 1 \dots (1)$$

Dapat dikatakan bahwa masyarakat miskin memiliki nilai MPC yang lebih tinggi karena mereka cenderung membelanjakan sebagian besar tambahan pendapatan untuk kebutuhan dasar. Oleh karena itu, dampak langsung adanya bansos untuk masyarakat miskin adalah peningkatan daya beli rumah tangga. Dengan kata lain dengan adanya bansos untuk masyarakat miskin (MPC besar) yang berperan dalam meningkatkan daya beli, dapat memberikan *multiplier effect* yang besar terhadap perekonomian

Selain melalui pendekatan Keynesian, hubungan antara bansos, konsumsi, dan kesejahteraan rumah tangga telah dibahas dalam berbagai penelitian. Sari & Kurniawati (2023) menunjukkan bahwa program bansos seperti PKH dapat memengaruhi pola konsumsi rumah tangga yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial, meskipun efeknya dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan kondisi sosial ekonomi penerima.

Dalam konteks kebijakan publik, bansos adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial (Permensos Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, 2019). Sejalan dengan hal itu, Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, dijelaskan bahwa belanja bansos digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Dalam hal jenis bansos berdasarkan bentuknya, terbagi atas bansos uang dan barang. Bansos dalam bentuk uang diberikan langsung kepada penerima, seperti beasiswa untuk anak dari keluarga miskin, bantuan bagi yayasan yatim piatu, nelayan kurang mampu, lansia, penyandang disabilitas berat, serta tunjangan kesehatan bagi anak pahlawan yang kurang mampu. Sementara itu, bansos dalam bentuk barang mencakup pemberian kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, perahu bagi nelayan miskin, makanan atau pakaian untuk yatim piatu dan tuna sosial, serta ternak bagi kelompok masyarakat prasejahtera.

Efektivitas bansos dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga dapat dilihat melalui indikator pengeluaran dan konsumsi per kapita. Pengeluaran Per Kapita adalah biaya yang digunakan untuk seluruh anggota keluarga yang dapat berupa pembelian, pemberian, dan/atau produksi sendiri untuk kategori makanan atau nonmakanan selama satu bulan dibagi dengan jumlah anggota keluarga (BPS, 2022b). Pengeluaran perkapita digunakan untuk menentukan status kemiskinan dari suatu rumah tangga. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan (BPS, 2022a). Selain pengeluaran, kualitas konsumsi juga dapat dilihat dari konsumsi kalori, protein, dan karbohidrat per kapita sebagai gambaran pemenuhan kebutuhan gizi rumah tangga.

Data mengenai kondisi sosial ekonomi, pengeluaran, dan konsumsi rumah tangga di Indonesia salah satunya diperoleh melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Susenas merupakan survei yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat meliputi kondisi kesehatan, pendidikan, fertilitas, keluarga berencana, perumahan dan kondisi sosial ekonomi lainnya. Data dan indikator dari Susenas telah dipergunakan secara luas dan dipandang sebagai salah satu bukti penting yang dapat berguna untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi program pembangunan pemerintah (BPS, 2016). Susenas dilakukan sebanyak dua kali per tahun dengan menggunakan dua bentuk kuesioner, yakni kuesioner KOR dan Konsumsi/Pengeluaran (KP). Kuesioner KOR merupakan kuesioner inti yang berisi terkait karakteristik individu dan rumah tangga, sementara kuesioner KP berfokus pada data konsumsi dan pengeluaran rumah tangga yang meliputi pengeluaran untuk makanan dan non-makanan, serta pola konsumsi rumah tangga (jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi)

Dari sisi metodologis, evaluasi dampak bansos pada data observasional memerlukan pendekatan yang mampu mengurangi bias seleksi. Hal ini penting karena penerima bansos umumnya tidak dipilih secara acak,

melainkan berdasarkan karakteristik tertentu seperti tingkat kemiskinan, kondisi tempat tinggal, jumlah anggota rumah tangga, atau kepemilikan kartu sosial. Salah satu metode dalam *Propensity Score* adalah *Propensity Score Matching* (PSM) dengan mekanisme yang dilakukan adalah setiap individu dalam kelompok perlakuan dicocokkan dengan individu dalam kelompok kontrol berdasarkan nilai *propensity score* yang mirip. Teknik ini bertujuan untuk menciptakan kelompok perlakuan dan kontrol yang seimbang dalam hal karakteristik awal, sehingga analisis lebih menyerupai eksperimen terkontrol secara acak.

Propensity score adalah probabilitas seseorang menerima perlakuan tertentu, yang dihitung berdasarkan karakteristik awal (*baseline covariates*). Metode ini memungkinkan analisis data observasional agar lebih menyerupai eksperimen terkontrol secara acak (*Randomized Controlled Trial, RCT*). Dengan menggunakan *propensity score*, distribusi karakteristik awal antara kelompok yang menerima perlakuan dan tidak menerima perlakuan dapat dibuat lebih seimbang, sehingga memungkinkan estimasi efek perlakuan yang lebih valid (Austin, 2011). Dengan kata lain, *propensity score methods* dijelaskan sebagai teknik yang digunakan untuk mengurangi bias akibat *confounding*.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengevaluasi dampak bansos terhadap kesejahteraan rumah tangga, seperti yang dilakukan oleh Khasanah & Purwanti (2023) menunjukkan bahwa bansos melalui PKH memberikan dampak signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Namun, penelitian ini terbatas pada penggunaan metode regresi DiD yang berpotensi menyebabkan bias seleksi. Selain itu, belum ditemukan penelitian terdahulu yang mengkaji dampak Bansos Daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki karakteristik PDRB tinggi namun ketimpangan besar. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data Susenas Tahun 2023 dan mengaplikasikan metode *Propensity Score Matching* (PSM) yang mampu mengurangi bias seleksi dalam mengkaji dampak Bansos Daerah terhadap pengeluaran dan konsumsi perkapita masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.

Selain itu, literatur lain menunjukkan bahwa dampak bansos terhadap kesejahteraan rumah tangga tidak selalu seragam. Pada satu sisi, bansos dapat mengurangi beban pengeluaran dan memperluas akses rumah tangga miskin terhadap layanan dasar. Wahyuni et al. (2023) menunjukkan bahwa PKH berdampak pada kesejahteraan rumah tangga melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, meskipun dampaknya belum selalu terhubung langsung dengan penurunan kemiskinan. Di sisi lain, Nurhasanah et al (2024). menemukan bahwa BST tidak memberikan dampak signifikan terhadap kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Bogor. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas bansos sangat bergantung pada desain program, besaran manfaat, durasi bantuan, dan karakteristik penerima

Dengan mengacu pada Teori Konsumsi Keynesian yang menyatakan bahwa konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan disposabel. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa pemberian bansos dapat meningkatkan pendapatan disposabel rumah tangga, sehingga meningkatkan pengeluaran rumah tangga dan berdampak kepada peningkatan kualitas konsumsi.

Teori lain seperti teori utilitas juga mendukung hal ini, dinyatakan bahwa rumah tangga akan mengalokasikan pengeluaran mereka untuk memaksimalkan utilitas. Bansos dapat mengubah alokasi pengeluaran rumah tangga, sehingga dapat berdampak kepada konsumsi masyarakat.

Hubungan antara bansos, pola konsumsi, dan kesejahteraan juga ditunjukkan oleh Sari & Kurniawati (2023) yang meneliti pengaruh pendidikan, PKH, dan pola konsumsi terhadap kesejahteraan sosial rumah tangga. Studi tersebut mendukung argumen bahwa bansos dapat bekerja melalui perubahan pola konsumsi rumah tangga, meskipun efek akhirnya terhadap kesejahteraan tetap dipengaruhi oleh karakteristik sosial ekonomi penerima

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengasumsikan bahwa pemberian bansos memiliki peran terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Oleh karena itu, hipotesis penelitian pada kajian ini adalah pemberian bansos Pemda memiliki pengaruh untuk meningkatkan pengeluaran dan konsumsi per kapita masyarakat penerima bansos di Provinsi Kalimantan Timur.

METODE PENELITIAN

Data *cross-sectional* – longitudinal yang digunakan bersumber dari Susenas KOR & KP Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023. Unit analisis yang digunakan adalah rumah tangga di Kalimantan Timur baik yang mendapatkan Bansos Daerah secara rutin maupun tidak berdasarkan data Susenas 2023. Bansos tersebut dapat meliputi bantuan rutin untuk pangan, anak, lansia, penyandang disabilitas dan lainnya yang diperoleh dari Pemerintah Daerah. Adapun definisi operasional variabel pada penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Nama Variabel	Definisi	Sumber
Variabel Outcome		
Pengeluaran Makanan Perkapita (Y1) (<i>food</i>)	Rata-rata jumlah uang yang dikeluarkan oleh setiap individu dalam suatu rumah tangga untuk membeli makanan dalam satu bulan	BPS
Pengeluaran Non-Makanan Perkapita (Y2) (<i>nfood</i>)	Rata-rata jumlah uang yang dikeluarkan oleh setiap individu dalam suatu rumah tangga untuk membeli bukan makanan dalam satu bulan	BPS
Konsumsi Kalori (Y3) (kalori)	Banyaknya Konsumsi Kalori Perkapita Sehari	BPS
Konsumsi Protein (Y4) (protein)	Banyaknya Konsumsi Protein Perkapita Sehari	BPS
Konsumsi Karbohidrat (Y5) (karbo)	Banyaknya Konsumsi Karbohidrat Perkapita Sehari	BPS
Variabel Treatment		
Status Partisipasi Bansos Pemda (bansos)	1 = Penerima Bansos Pemda 2 = Bukan Penerima Bansos Pemda	BPS
Variabel Kovariat		
Jumlah ART (ART)	Jumlah anggota rumah tangga	
Status Tempat Tinggal (kotdes)	1 = Perkotaan 0 = Pedesaan	BPS
Luas Lantai (lantai)	Luas lantai tempat tinggal	BPS
Dinding Terluas (dinding)	Dinding terluas tempat tinggal (1: Beton; 0: lainnya)	BPS
Air Minum (minum)	Jenis Air Minum yang dikonsumsi (1: kemasan/isi ulang; 0: lainnya)	BPS
Jenis Kelamin (JK)	Jenis Kelamin Kepala Keluarga (1: Pria; 0: Wanita)	BPS
Ijazah KK (ijazah)	Ijazah terakhir Kepala Keluarga (1: SMA ke atas; 0: lainnya)	BPS

Sumber: Diolah peneliti

Metode analisis yang digunakan adalah Analisis *Propensity Score Matching* (PSM) dengan tahapan analisis sebagai berikut. **Pertama, Menentukan Variabel Outcome dan Treatment** dimana variabel *outcome* pada kajian ini adalah pengeluaran makanan & nonmakanan, konsumsi protein dan karbohidrat per kapita dengan variabel bansos (menerima/tidak) sebagai *treatment*-nya. Tahapan **kedua, Menentukan Kovariat** dimana variabel kovariat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain seperti: jumlah ART, perkotaan/pedesaan, luas lantai, dinding terluas (1: beton; 0: lainnya), Air Minum (1: kemasan/isi ulang; 0: lainnya), jenis kelamin KK, dan Ijazah terakhir KK (1: SMA ke atas; 0: lainnya). Tahap **ketiga** adalah **Mengestimasi Propensity Score** *Propensity score* dalam penelitian ini diestimasi dengan menggunakan model logit berikut:

$$\text{logit}(P(\text{Bansos} = 1))$$

$$= \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{ART} + \beta_2 \cdot \text{kotdes} + \beta_3 \cdot \text{lantai} + \beta_4 \cdot \text{dinding} + \beta_5 \cdot \text{minum} + \beta_6 \cdot \text{PKH} + \beta_7 \cdot \text{JK} + \beta_8 \cdot \text{ijazah} + \beta_9 \cdot \text{KIP}$$

keterangan:

Bansos: (1: Penerima; 0: Bukan Penerima)

Tahap **keempat** adalah **Melakukan Matching**. Berdasarkan *propensity score* yang telah dihitung, dilakukan pencocokan antara individu yang menerima *treatment* (*treated*) dan yang tidak menerima *treatment* (*control*). Dalam penelitian ini, digunakan teknik *Nearest Neighbor Matching*, karena teknik ini memungkinkan pencocokan individu dengan *propensity score* terdekat, yang membantu meningkatkan akurasi estimasi dampak perlakuan dengan meminimalisasi kesalahan akibat pencocokan yang tidak relevan. Teknik ini juga relatif mudah diimplementasikan dan telah banyak digunakan dalam studi serupa. Tahap **kelima** adalah **Memeriksa Keseimbangan Kovariat**. Setelah melakukan pencocokan, dilakukan uji keseimbangan (*balance test*) untuk memastikan bahwa distribusi variabel kovariat seimbang antara kelompok *treated* dan *control*.

Tahap **keenam** adalah **Menghitung efek treatment**. Dampak bansos dapat diperoleh dengan mencari perbandingan rata-rata dampak dari rumah tangga yang menerima bansos maupun tidak. Adapun 3 parameter utama pada PSM (Heinrich et al., 2010), yaitu (1) *Average Treatment Effect* (ATE) - Selisih antara rata-rata hasil potensial pada kelompok yang menerima perlakuan dan kelompok pembanding, (2) *Average*

Treatment Effect on the Treated (ATT) - Selisih rata-rata hasil potensial pada kelompok yang menerima perlakuan dibandingkan dengan kondisi hipotetis jika mereka tidak menerima perlakuan, dan (3) *Average Treatment Effect on the Untreated (ATU)* - Selisih rata-rata hasil potensial pada kelompok yang tidak menerima perlakuan dibandingkan dengan kondisi hipotetis jika mereka menerima perlakuan. Tahap terakhir adalah **Intepretasi Hasil** dengan melakukan intepretasi atas hasil yang diperoleh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis deskriptif sebagaimana pada Tabel 2 yang menunjukkan karakteristik individu yang terbagi atas kelompok penerima dan bukan penerima bansos. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat sebanyak 6020 Rumah Tangga yang menjadi sampel di Provinsi Kalimantan Timur, dimana sebanyak 250 rumah tangga (4,2%) merupakan penerima rutin bansos dari Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Jika ditinjau berdasarkan karakteristiknya, pada umumnya kelompok penerima bansos bertempat tinggal di pedesaan, dengan dinding bukan benton, memiliki kepala keluarga berjenis kelamin laki-laki dengan ijazah di bawah SMA. Secara rata-rata, dari sisi jumlah ART dan Luas Lantai, Kelompok Penerima Bansos memiliki jumlah ART yang lebih banyak dan luas lantai yang lebih sempit dibandingkan dengan kelompok bukan penerima bansos. Hal ini menjadi indikasi bahwa taraf hidup penerima bansos masih lebih rendah.

Tabel 2 Statistik Deskriptif Variabel Kovariat (Data Kategorik)

Variabel Kovariat	Status Partisipasi Bansos	
	(1 = Penerima Bansos)	(0 = Bukan Penerima Bansos)
(1)	(2)	(3)
Jumlah ART (Numerik)	3,82 Orang	3,64 Orang
Luas Lantai (Numerik)	71,35 m ²	83,82 m ²
Status Tempat Tinggal		
Perkotaan	111 (1,8%)	3495 (58,1%)
Pedesaan	139 (2,3%)	2275 (37,8%)
Dinding Terluas		
Beton	91 (1,5%)	2503 (41,6%)
Lainnya	159 (2,6%)	3267 (54,3%)
Air Minum		
Kemasan/Isi Ulang	198 (3,3%)	4555 (75,7%)
Lainnya	52 (0,9%)	1215 (20,2%)
Jenis Kelamin KK		
Laki-Laki	212 (3,5%)	5048 (83,9%)
Perempuan	38 (0,6%)	722 (12,0%)
Ijazah KK		
SMA ke Atas	77 (1,3%)	2858 (47,5%)
Lainnya	173 (2,9%)	2912 (48,4%)
Total	250 (4,2%)	5770 (95,8%)

Sumber: Diolah peneliti

Berdasarkan hasil estimasi *Propensity Score Matching*, dilakukan pengujian *Goodness of Fit* untuk memastikan bahwa model yang dihasilkan dapat dikategorikan baik dalam mengestimasi status partisipasi bansos. Berdasarkan Uji Hosmer dan Lomeshow diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,505 (>5%). Artinya, dengan tingkat signifikansi 5%, dapat disimpulkan bahwa model yang terbentuk sudah baik dalam menjelaskan status partisipasi bansos di Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya, dilakukan pengujian signifikansi variabel kovariat secara simultan, uji Omnibus LR menunjukkan nilai *p-value* sebesar 0,000 (<5%). Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa terdapat minimal sebanyak satu variabel kovariat yang berpengaruh signifikan terhadap status partisipasi bansos (signifikan secara simultan).

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan model logit yang ditunjukkan pada Tabel 2, ditemukan bahwa rumah tangga yang diikutsertakan sebagai penerima bansos rutin dari pemerintah ditentukan/dipengaruhi secara negatif signifikan oleh domisili tempat tinggal (kota), luas lantai, dan ijazah kepala keluarga, namun untuk variabel jumlah ART memiliki pengaruh positif signifikan terhadap status partisipasi bansos.

Jumlah anggota rumah tangga memiliki koefisien sebesar 0,109, artinya setiap peningkatan satu ART akan meningkatkan peluang untuk menjadi penerima bansos sebesar 10,9%, *ceteris paribus*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridha & Rumayya (2024) yang menemukan adanya pengaruh positif

signifikan antara jumlah anggota rumah tangga terhadap peningkatan peluang untuk memperoleh bantuan pangan non-tunai di Provinsi Maluku. Rumah tangga dengan jumlah ART yang lebih banyak tentunya memiliki beban ekonomi yang lebih besar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini dapat menyebabkan rumah tangga tersebut lebih rentan terhadap kemiskinan. Selain itu, jumlah anggota rumah tangga berkaitan kuat dengan nilai pendapatan per kapita yang menjadi salah satu indikator penentuan tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Tabel 3 Estimasi Regresi Logit (Y = Bansos)

Variabel (1)	Koefisien (2)	Odds Ratio (3)	p-value (4)
Intersep	-3,162***	0,042	0,000
ART	0,109***	1,115	0,008
Kotadesa	-0,513***	0,598	0,000
Lantai	-0,004***	0,996	0,002
Dinding	0,121	1,128	0,409
Minum	0,181	1,198	0,263
JK_KK	0,296	1,344	0,119
Ijazah KK	-0,665***	0,514	0,000

Ket : ***: sig. pada level 1%, **: sig. pada level 5%, *: sig. pada level 10%

Sumber: Diolah peneliti

Variabel luas lantai tempat tinggal juga memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap peluang sebuah rumah tangga menerima bansos. Nilai koefisien sebesar 0,004 mengartikan setiap peningkatan luas lantai sebesar 1 satuan, dapat menurunkan peluang untuk menerima bansos sebesar 0,4%. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh BPS (2020) yang menjadikan luas lantai menjadi salah satu indikator untuk menentukan status kemiskinan suatu rumah tangga. Pada studi tersebut dinyatakan bahwa rumah tangga terkategori miskin apabila luas lantai perkapita lebih rendah dari 8m².

Selain itu, wilayah tempat tinggal juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap status partisipasi bansos di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil estimasi, rumah tangga yang bertempat tinggal di daerah perkotaan memiliki peluang 0,598 kali untuk memperoleh bansos dibandingkan dengan rumah tangga yang bertempat tinggal di daerah pedesaan. Artinya masyarakat pedesaan memiliki peluang lebih besar untuk menerima bansos. Hal ini dapat terjadi karena tingkat kemiskinan masyarakat desa cenderung lebih besar dibandingkan kota. Selain itu, pemerintah juga membuat kebijakan dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota, salah satu langkah pemerintah adalah dengan adanya pemberian BLT melalui penyaluran dana desa. Supandi (2021) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa masyarakat pedesaan memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh bantuan raskin dibandingkan dengan masyarakat perkotaan.

Sejalan dengan hal di atas, variabel ijazah terakhir yang dimiliki kepala keluarga juga berpengaruh negatif terhadap status partisipasi bansos. Dengan nilai *odds ratio* sebesar 0,514 mengartikan bahwa sebuah rumah tangga dengan kepala keluarga berijazah SMA ke atas memiliki peluang yang lebih rendah untuk memperoleh bansos dibandingkan rumah tangga dengan kepala keluarga berijazah di bawah SMA. Penelitian yang dilakukan oleh Eha (2024) menyebutkan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus menjadi aspek penting untuk keluar dari zona kemiskinan.

Berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang berdomisili tempat tinggal di perkotaan, atau ijazah KK SMA ke atas, atau semakin besar luas lantainya akan memiliki peluang yang lebih rendah untuk mendapatkan bansos dibandingkan dengan rumah tangga di pedesaan, atau ijazah KK di bawah SMA, atau semakin sempit luas lantainya. Temuan mengenai pentingnya jumlah anggota rumah tangga dan pendidikan kepala keluarga juga sejalan dengan Yasa & Wijaya (2024) yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga memengaruhi pendapatan keluarga penerima BLT Dana Desa, sementara pendapatan menjadi faktor yang memediasi konsumsi. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa karakteristik rumah tangga perlu dikendalikan dalam evaluasi dampak bansos.

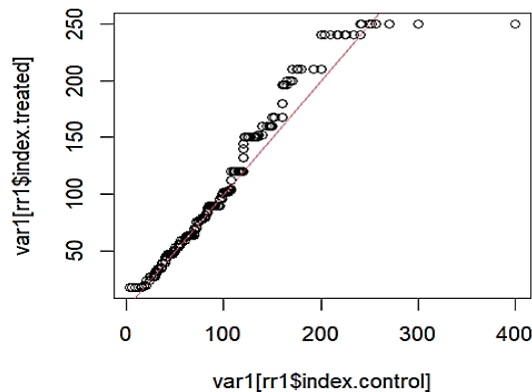
Pola ini menunjukkan bahwa penyaluran bansos daerah relatif mengarah pada rumah tangga dengan karakteristik sosial ekonomi yang lebih rentan. Temuan tersebut dapat dikaitkan dengan studi Salam et al. (2021) yang menunjukkan bahwa karakteristik rumah tangga memiliki pengaruh berbeda terhadap kemiskinan moneter dan kemiskinan multidimensi. Selain itu, Saputri et al. (2021) menekankan bahwa faktor

nonmoneter seperti modal sosial juga berkaitan dengan kemiskinan rumah tangga. Oleh karena itu, karakteristik penerima bansos dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai bagian dari kerentanan rumah tangga yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga multidimensi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rasyid et al. (2020) juga menunjukkan bahwa pendidikan, kemampuan menyediakan makanan, kemampuan membayar biaya pengobatan, luas lantai, dan pendapatan berpengaruh terhadap status kemiskinan rumah tangga. Faturohim et al. (2023) juga menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor dominan dalam kemiskinan dan pengangguran perkotaan

Pada penelitian ini metode *matching observation* yang digunakan adalah metode *Nearest Neighbor* (NN) *Matching* artinya setiap unit dalam kelompok *treatment* akan dicocokkan dengan unit yang memiliki *propensity score* atau karakteristik yang paling dekat dari kelompok kontrol.

Gambar 3 Grafik kemiripan variabel control dan treated



Berdasarkan **Error! Reference source not found.**, dengan menggunakan salah satu variabel kovariat, yaitu luas lantai, setelah dilakukan *matching* terlihat bahwa adanya keseragaman karakteristik antara variabel *treated* dan *control* yang ditunjukkan oleh sebagian besar titik sangat dekat terhadap garis miring pada gambar.

Tabel 4 menunjukkan bahwa hasil *matching* berhasil mencocokkan rumah tangga penerima dan bukan penerima bansos berdasarkan kemiripan karakteristik berdasarkan variabel kovariat yang digunakan pada penelitian ini.

Tabel 4 Balancing Table

Variabel (1)	Status Matching (2)	Penerima Bansos (3)	Bukan Penerima Bansos (4)	<i>p-value</i> (uji beda t) (5)
ART	Sebelum	3,824	3,649	0,11
	Sesudah	3,824	3,802	0,83
Kotadesa	Sebelum	1,444	1,606	0,00
	Sesudah	1,444	1,44	0,79
Lantai	Sebelum	71,348	83,825	0,00
	Sesudah	71,348	70,358	0,70
Dinding	Sebelum	1,364	1,434	0,03
	Sesudah	1,364	1,343	0,53
Minum	Sebelum	1,792	1,802	0,68
	Sesudah	1,792	1,790	0,92
JK_KK	Sebelum	0,848	0,874	0,24
	Sesudah	0,848	0,872	0,26
Ijazah KK	Sebelum	1,308	1,495	0,00
	Sesudah	1,308	1,306	0,92

Sumber: Diolah peneliti

Berdasarkan hasil analisis estimasi efek *Treatment* yang tersaji pada Tabel 5 dengan menggunakan metode ATT, terdapat 4 (empat) dari 5 (lima) *outcome*, yaitu variabel pengeluaran makanan, nonmakanan, konsumsi kalori dan protein, menunjukkan bahwa program bansos secara signifikan dapat menurunkan beban pengeluaran per kapita masyarakat Kalimantan Timur. Jika ditinjau berdasarkan konsumsi, tanda negatif pada perbedaan rata-rata (*diff*) menunjukkan bahwa tingkat konsumsi per kapita pada kelompok yang mendapat perlakuan sedikit lebih rendah dibanding kelompok kontrol. Oleh karena itu dapat dikatakan

bahwa secara rata-rata, pemberian bansos dinilai belum dapat secara signifikan dalam meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat yang ditargetkan sebagai penerima bansos.

Tabel 5 Estimasi efek treatment (per kapita)

Variabel (1)	diff (2)	Efek $e^{diff} - 1$ (3)	<i>p-value</i> (4)
Pengeluaran makanan	-0,135***	-12,63%	0,0002
Pengeluaran nonmakanan	-0,168**	-15,46%	0,0000
Konsumsi Kalori	-0,037*	-3,63%	0,0907
Konsumsi Protein	-0,059**	-5,73%	0,0372
Konsumsi Karbo	-0,008	-0,79%	0,6869

Ket : *** : sig. pada level 1%, ** : sig. pada level 5%, * : sig. pada level 10%

Sumber: Diolah peneliti

Tabel 5 menunjukkan bahwa program bansos yang diterima masyarakat secara signifikan dapat menurunkan beban pengeluaran makanan sebesar 12,63%, dan pengeluaran non makanan sebesar 15,46%. Hal ini ditentukan berdasarkan nilai *difference* dari variabel pengeluaran makanan dan nonmakanan per kapita yang telah ditransformasi dalam bentuk logaritma natural. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Supandi (2021), penelitian tersebut menemukan bahwa secara rata-rata program pemberian raskin dapat menurunkan beban pengeluaran bukan makanan per kapita per bulan sebesar 16,22% atau sebesar Rp49.129, serta dapat pula menurunkan beban pengeluaran untuk makanan sebesar 7,31% atau sebesar Rp33.882.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Meilianna (2024) juga menunjukkan bahwa bantuan langsung tunai, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah, dapat meningkatkan pengeluaran nonmakanan penerima bantuan. Temuan tersebut memberi pembandingan penting bagi penelitian ini karena menunjukkan bahwa bentuk bantuan tunai dapat memengaruhi alokasi pengeluaran rumah tangga, meskipun arah dan besar dampaknya dapat berbeda sesuai jenis bantuan, karakteristik penerima, dan konteks wilayah

Berdasarkan *outcome* pada kelompok konsumsi, dapat dibuktikan pada tingkat signifikansi 5% bahwa masyarakat Provinsi Kalimantan yang menerima bansos memiliki konsumsi kalori dan protein yang lebih rendah sebesar 3,63% dan 5,73% dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang tidak menerima bansos. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan bansos belum sepenuhnya berpengaruh signifikan meningkatkan kualitas konsumsi, karena terdapat kemungkinan bahwa bansos yang diberikan tidak sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan konsumsi makanan bergizi, melainkan dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, atau pembayaran utang. Selain itu, jenis bantuan yang diberikan, baik dalam bentuk tunai maupun natura, mungkin tidak cukup untuk meningkatkan kualitas konsumsi secara signifikan. Faktor lain seperti pola belanja rumah tangga, akses terhadap pangan bergizi, serta preferensi konsumsi juga dapat memengaruhi efektivitas bansos dalam meningkatkan asupan kalori dan protein. Oleh karena itu, evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana rumah tangga penerima memanfaatkan bansos dan apakah intervensi tambahan diperlukan untuk memastikan peningkatan kualitas konsumsi.

Hal yang cukup menarik ditunjukkan oleh hasil konsumsi karbohidrat yang tidak signifikan berbeda secara statistik antara kelompok penerima bansos dan tidak. Ini berarti perubahan pengeluaran atau konsumsi kemungkinan besar terjadi pada kategori makanan lain, seperti protein, sayur, atau buah-buahan. Kondisi ini dapat terjadi karena bagi rumah tangga dengan keterbatasan ekonomi, karbohidrat sering kali menjadi sumber utama kalori yang lebih terjangkau dibandingkan dengan protein atau makanan bernutrisi lainnya. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrawati et al. (2009). Penelitian tersebut menyebutkan bahwa Penduduk miskin cenderung mengonsumsi makanan dengan kandungan karbohidrat tinggi namun rendah protein, serat, dan vitamin, hal ini terjadi karena karbohidrat masih menjadi sumber energi yang paling terjangkau dari sisi harga.

Rendahnya konsumsi kalori dan protein pada kelompok penerima bansos mengindikasikan bahwa bantuan yang diterima belum cukup kuat untuk memperbaiki kualitas konsumsi. Kondisi ini dapat terjadi karena rumah tangga miskin cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar yang paling mendesak, sementara konsumsi pangan bergizi seperti protein hewani, buah, dan sayuran membutuhkan kemampuan daya beli yang lebih tinggi. Literatur mengenai daya beli rumah tangga menunjukkan bahwa kelompok berpenghasilan rendah paling rentan terhadap tekanan harga kebutuhan pokok karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk konsumsi dasar (Wahyuni et al., 2023)

Temuan bahwa bansos daerah menurunkan beban pengeluaran makanan dan nonmakanan menunjukkan bahwa program ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial jangka pendek. Namun, penurunan beban pengeluaran belum otomatis berarti peningkatan kualitas konsumsi. Hasil ini sejalan dengan Nurhasanah et al. (2024) yang menemukan bahwa BST tidak berdampak signifikan terhadap kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Bogor. Dengan demikian, bansos dapat membantu mengurangi tekanan pengeluaran, tetapi belum tentu cukup untuk mengubah kesejahteraan rumah tangga secara lebih mendasar

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa karakteristik rumah tangga berpengaruh terhadap peluang menerima bansos. Rumah tangga yang tinggal di perkotaan, memiliki kepala keluarga dengan tingkat pendidikan SMA ke atas, atau memiliki luas lantai rumah yang lebih besar cenderung memiliki kemungkinan lebih rendah untuk menerima bansos. Sebaliknya, rumah tangga yang terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) justru lebih berpeluang mendapatkan bantuan.

Selain itu, proses Matching Observation dengan metode *Nearest Neighbor* berhasil menciptakan kesamaan karakteristik antara kelompok penerima dan non-penerima bansos. Dengan demikian, analisis dampak program dapat dilakukan secara lebih akurat dan objektif. Dari sisi pengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga, program bansos di Kalimantan Timur terbukti mampu mengurangi beban finansial. Bantuan yang diberikan berkontribusi pada penurunan pengeluaran rumah tangga sebesar 10,53% untuk kebutuhan makanan dan 11,69% untuk kebutuhan non-makanan. Sementara itu, konsumsi karbohidrat tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara rumah tangga penerima dan non-penerima bansos. Temuan ini mengindikasikan bahwa karbohidrat tetap menjadi sumber utama kalori yang stabil dalam pola konsumsi rumah tangga, terlepas dari adanya bansos.

Meskipun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bansos dapat menurunkan beban pengeluaran per kapita, terutama pada pengeluaran makanan dan non-makanan, program ini belum dapat secara signifikan meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, melalui pengalokasian dana APBD, Pemda perlu mempertimbangkan untuk melakukan *re-design* program bansos dalam mendorong belanja yang lebih berfokus pada kebutuhan gizi rumah tangga, seperti protein, sayuran, dan buah-buahan, agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan kualitas konsumsi.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas program bansos. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memfokuskan penyaluran bansos pada rumah tangga di pedesaan serta keluarga dengan kepala rumah tangga berpendidikan di bawah SMA. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan diterima oleh kelompok yang paling membutuhkan.

Selain itu, diperlukan evaluasi oleh Pemda secara berkala dengan memanfaatkan system digital terpadu untuk memastikan bahwa program bansos benar-benar tepat sasaran serta memiliki dampak nyata terhadap pengeluaran dan konsumsi masyarakat. Evaluasi ini juga dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang. Integrasi dengan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat memastikan bahwa bantuan tepat sasaran pada rumah tangga yang benar-benar membutuhkan.

Dalam upaya meningkatkan konsumsi dan status gizi masyarakat, program makan bergizi gratis dapat menjadi salah satu alternatif solusi. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa penerima bansos memiliki tingkat konsumsi protein dan kalori yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok non-penerima.

Di samping itu, bentuk bansos dapat dikembangkan agar lebih spesifik sesuai kebutuhan kelompok sasaran, misalnya dalam bentuk bantuan pangan, kesehatan, dan pendidikan. Bansos tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga dapat berupa pembinaan, pemberdayaan, dan pendampingan. Dengan demikian, keluarga penerima bantuan dapat lebih mandiri dan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih baik.

Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai program bansos serta prosedur pengaksesannya juga menjadi faktor penting dalam optimalisasi program ini. Sosialisasi yang lebih intensif dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Terakhir, diperlukan sistem pemantauan yang berkelanjutan untuk memastikan distribusi bansos berjalan dengan transparan dan akuntabel. Dengan adanya mekanisme pemantauan yang baik, pemerintah dapat melakukan intervensi yang lebih cepat dan tepat apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan program.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan terkait pemilihan *treatment* bansos dimana penerima bansos didasarkan pada seluruh jenis program bansos yang berasal dari pemerintah daerah, tidak mencakup bansos pemerintah pusat, yang meliputi Bantuan untuk pangan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan lainnya. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada rumah tangga di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasi untuk daerah lain di Indonesia.

Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan perluasan lingkup analisis dan penajaman bentuk jenis bansos apakah dalam bentuk uang, barang ataupun fasilitas seperti Pendidikan atau Kesehatan. Hal ini dilakukan sehingga hasil analisis dapat melihat alokasi penggunaan bansos dari para penerima apakah untuk makanan atau non makanan.

REFERENSI

- Austin, P. C. (2011). An introduction to propensity score methods for reducing the effects of confounding in observational studies. *Multivariate Behavioral Research*, 46(3), 399–424. <https://doi.org/10.1080/00273171.2011.568786>
- BPS. (2016). *Survei sosial ekonomi nasional (Susenas) KOR dan konsumsi maret 2016*. <https://manokwarikab.bps.go.id/id/news/2016/03/01/6/survei-sosial-ekonomi-nasional--susenas--kor-dan-konsumsi-maret-2016.html>
- BPS. (2022a). *Jumlah penduduk miskin*. <https://sirusa.web.bps.go.id/metadatas/variabel/178216>
- BPS. (2022b). *Pengeluaran per kapita*. <https://sirusa.web.bps.go.id/metadatas/variabel/178220>
- Eha, J. La. (2024). Analisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat menggunakan indikator Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. *Journal of Geographical Sciences and Education*, 2(1), 27–35. <https://doi.org/10.69606/geography.v2i1.82>
- Faturohim, A., Akbar, A., Hidayat, B. A., & Saksono, H. (2023). An analysis of urban poverty and unemployment. *Jurnal Bina Praja*, 15(2), 309–324. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.309-324>
- Heinrich, C., Maffioli, A., & Vázquez, G. (2010). *A primer for applying propensity-score matching impact-evaluation guidelines*. www.iadb.org
- Indrawati, L., Werdhastari, A., & Yudi, A. (2009). Hubungan pola kebiasaan konsumsi makanan masyarakat miskin dengan kejadian hipertensi di Indonesia. *Media Penelit. Dan Pengembang. Kesehatan. Volume XIX Nomor 4 Tahun 2009*.
- Khasanah, U., & Purwanti, Y. (2023). Pengaruh program keluarga harapan (PKH) terhadap pengeluaran pendidikan dan konsumsi keluarga penerima manfaat PKH di Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang. In *JDEP* (Vol. 6, Number 1). <https://doi.org/10.14710/jdep.6.1.78-99>
- Meilianna, R. (2024). Evaluasi bantuan langsung tunai pemerintah dan nonpemerintah terhadap pengeluaran masyarakat. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 15(1), 109–120. <https://doi.org/10.22212/jekp.v15i1.3262>
- Najmi, I., Hasrina, C. D., Asmawati, & Ansari, R. (2024). Belanja pemerintah, FDI, Pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan industri, dan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. <https://doi.org/10.21002/jepi.2024.11>
- Nurhasanah, S., Juanda, B., & Sugema, I. (2024). Dampak program bantuan sosial tunai terhadap kemiskinan rumah tangga di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*. <https://doi.org/10.29244/jekp.13.1.2024.30-43>
- Rasyid, R., Agustang, A., Agustang, A. T. P., Bastiana, B., & Najamuddin, N. (2020). Analisis faktor yang mempengaruhi status kemiskinan rumah tangga pada wilayah central business district (CBD) di Kota Makassar. *Majalah Geografi Indonesia*, 34(1). <https://doi.org/10.22146/mgi.54461>
- Ravallion, M., Carneiro, P., Coudouel, A., Das, J., Friedman, J., Galasso, E., Goldstein, M., Garcia-Montalvo, J., McKenzie, D., Mesnard, A., Mu, R., Schady, N., Schultz, P., Strauss, J., Skoufias, E., & Todd, P. (2005). *Evaluating anti-poverty programs*. <http://econ.worldbank.org>
- Ridha, M. R., & Rumayya, R. (2024). Analisis dampak program bantuan pangan non-tunai terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga pertanian di Maluku. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 24(1), 17–30. <https://doi.org/10.21002/jepi.2024.02>
- Rosenbaum, P. R., & Rubin, D. B. (1983). *The central role of the propensity score in observational studies for causal effects* (Vol. 70, Number 1). <https://doi.org/10.1093/biomet/70.1.41>
- Sahara, N. M., Handayani, D., & Santoso, M. (2024). Dampak program bantuan sosial sebagai intervensi gizi sensitif terhadap status stunting pada balita. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 9(1). <https://doi.org/10.7454/eki.v9i1.1034>
- Salam, A., Pratomo, D. S., & Saputra, P. M. A. (2021). Analisis kemiskinan pada rumah tangga di Jawa Timur melalui pendekatan multidimensi dan moneter. *Jurnal Kependudukan Indonesia*. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i2.480>
- Saputri, A., Listyaningsih, U., & Pangaribowo, E. H. (2021). Modal sosial dan kemiskinan rumah tangga di Indonesia. *Jurnal Kawistara*. <https://doi.org/10.22146/kawistara.v11i3.66012>
- Sari, S. N., & Kurniawati, T. (2023). Pengaruh tingkat pendidikan, program keluarga harapan (PKH) dan pola konsumsi terhadap kesejahteraan sosial rumah tangga di Kelurahan Air Tawar Barat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2). <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.7328>

- Supandi. (2021). Dampak raskin terhadap pengeluaran per kapita di Kabupaten Ketapang. *Forum Analisis Statistik*, 2021(1), 6–16. <https://doi.org/10.57059/formasi.v1i1.6>
- Wahyuni, W., Dwiarto, R., Suwarno, R. S., & Giyanto, B. (2023). Evaluasi kebijakan perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan melalui program keluarga harapan (PKH). *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik*, 5(2), 11-22. <https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/jpap/article/view/688>
- Yasa, I. G. W. M., & Wijaya, I. W. T. S. (2024). Pengaruh tingkat pendidikan, status pekerjaan, jumlah anggota keluarga terhadap pendapatan keluarga dan konsumsi penerima bantuan langsung tunai dana desa di Kabupaten Klungkung. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*. <https://doi.org/10.24843/EEP.2024.v13.i09.p04>